

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepercayaan publik memberikan kontribusi yang substansial terhadap penyelenggaraan pemerintah baik melalui kebijakan maupun dalam pelaksanaan program pemerintahan. Apabila masyarakat mempunyai kepercayaan publik terhadap pemerintah maka masyarakat akan mendukung kebijakan serta program pemerintah yang diterapkan. Kepercayaan publik yang tinggi dilihat dari implementasi yang dilaksanakan mampu dipatuhi oleh masyarakat. Bagi instansi pemerintah, kepercayaan publik mempunyai peran penting sebagai elemen dalam membentuk tata kelola pemerintah yang baik, seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan. Namun, kepercayaan publik tidak akan meningkat secara otomatis dikarenakan tetap ada dampak dari ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah (Rian Andhika, 2018). Hal-hal yang dapat menurunkan ketidakpercayaan publik yakni adanya pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah sangat buruk, biasanya terjadi akibat tidak adilnya dalam memberikan pelayanan.

Beberapa penelitian terdahulu berpendapat bahwa kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah dipengaruhi oleh beragam faktor. Salah satu faktor diantaranya yaitu transparansi dari pemerintah baik dalam menyampaikan informasi yang akurat maupun dalam konsistensi dan keterbukaan dalam komunikasi antara lembaga publik dan masyarakat. Ketika pemerintah bersikap terbuka, masyarakat akan cenderung percaya bahwa pemerintah mengutamakan kepentingan publik. Sebaliknya, ketika pemerintah bersikap tidak transparansi maka timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Faktor lainnya yaitu kualitas layanan publik, pelayanan publik menjadi kunci utama dalam menjalankan tanggung jawab instansi pemerintah terhadap masyarakat. Menurut Syafiqurrohman (2023) kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, menurut penelitian bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat apabila memberikan pelayanan dengan baik. Selain itu faktor yang terakhir yaitu akuntabilitas, dimana pemerintah bersedia mendapatkan saran dan kritik atas tindakan maupun keputusan. Dalam akuntabilitas, pemerintah menanggapi keluhan masyarakat dengan baik, menangani permasalahan, dan menunjukkan laporan kinerja yang jelas. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya Rahimallah et al. (2023) menunjukkan bahwa pemerintah dengan sistem akuntabilitas yang baik cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah yang memiliki akuntabilitas buruk. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan, pelayanan yang baik, dan akuntabilitas berkorelasi satu sama lain dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Di era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang, media sosial menjadi platform utama dalam pelayanan informasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pelayanan publik mampu dilaksanakan dengan singkat dan daya tampung yang lebih besar. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan organisasi pemerintah yang memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (PAN RB, 2020). Media sosial menjadi salah satu bentuk implementasi dari konsep *Open Government* di era digital, dimana menjadi salah satu strategi yang diakui untuk membangun kepercayaan publik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari penelitian terdahulu, dimana menurut Mergel (2013) penggunaan media sosial oleh pemerintah mampu meningkatkan persepsi masyarakat terhadap transparansi yang diberikan pemerintah melalui informasi yang disajikan secara relevan, akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu platform yang sering digunakan yaitu Instagram yang menjadi cara cepat dan interaktif digunakan pemerintah untuk berinteraksi serta berbagi informasi secara luas kepada masyarakat.

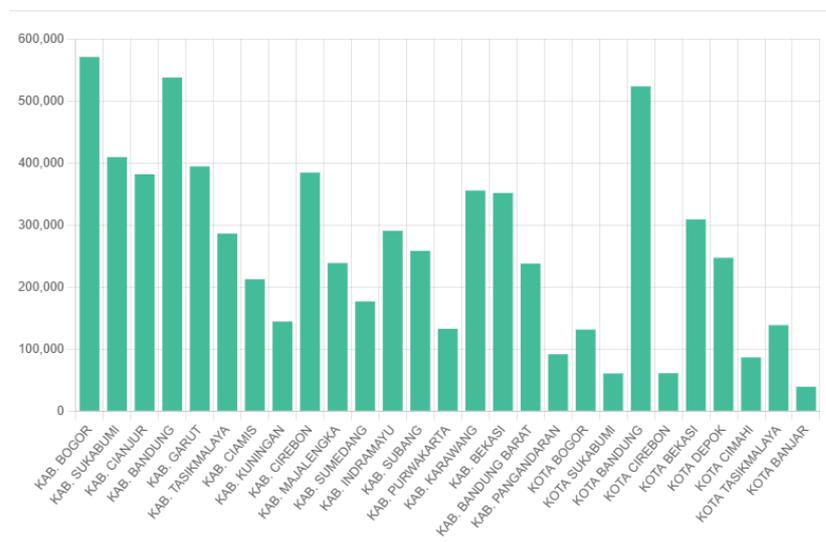
Pada tingkat pemerintah daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga pemerintah daerah yang berperan penting dalam memfasilitasi pertumbuhan investasi dan pelayanan publik dalam menyediakan layanan perizinan dan non-perizinan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Instansi ini dibentuk untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Dinas PMPTSP Jawa barat memiliki peran dalam menarik investasi yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja. Dinas PMPTSP Jawa Barat memiliki kedudukan dibawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, Dinas PMPTSP Jawa Barat mempunyai posisi strategis dalam mendukung kebijakan investasi dan pelayanan publik, dan berperan penting sebagai kordinator antar instansi terkait dalam proses perizinan. Lembaga ini juga tugas dalam mengembangkan kebijakan teknis terkait penanaman modal, melaksanakan promosi potensi investasi daerah, dan membantu dan menyelesaikan masalah yang dihadapi investor. Selain itu, DPMPTSP bertanggung jawab untuk menjamin proses perizinan yang transparan dan akuntabel. Dengan fungsi dan tugasnya, mereka memainkan peran penting dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, meningkatkan daya tarik investasi untuk daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam upaya meningkatkan implementasi *Open Government*, Dinas PMPTSP Jawa Barat memanfaatkan berbagai media sosial termasuk Instagram melalui akun resminya dengan *username* @dpmptsp.jabar. Penggunaan media sosial Instagram ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kolaborasi dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan secara modern dan interaktif. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 83/2012 Tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (PERMENPANRB, 2012). Hal ini menjadi salah satu contoh

bagaimana pemerintah memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait pelayanan, kebijakan dan program pemerintah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat.

UMKM memiliki kontribusi penting dalam perekonomian di Jawa Barat khususnya di sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Sektor UMKM membantu meningkatkan produktivitas ekonomi, menyerap tenaga lokal serta memperkuat ekonomi domestik. Berdasarkan data tahun 2023, total Proyeksi Jumlah Umkm adalah 7.055.660, naik 5.83% (opendata.jabarprov.go.id).

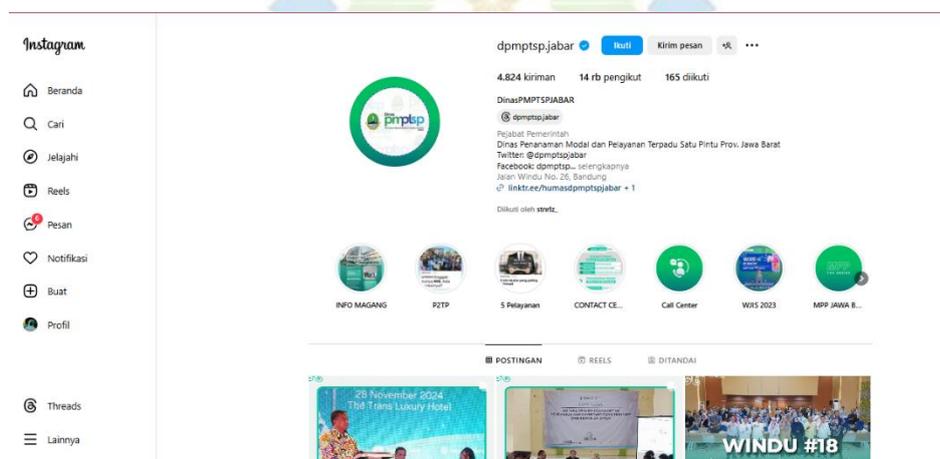


**Gambar 1. 1 Data Proyeksi Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023**

*Sumber: Open Data Jabar*

**Gambar 1.1.** merupakan representasi jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan yang signifikan di berbagai kabupaten dan kota. UMKM di wilayah ini didorong oleh potensi ekonomi lokal yang beragam, mulai dari sektor perdagangan, kuliner, kerajinan. Kota Bandung, kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor menjadi penyumbang kontribusi tinggi terhadap jumlah UMKM dikarenakan urbanisasi dan akses pasar yang sangat baik. Wilayah lainnya seperti Kabupaten Garut dan Tasikmalaya juga mengalami peningkatan jumlah UMKM. Dalam upaya mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM, Dinas

PMPTSP Jawa Barat melalui akun Instagramnya membagikan informasi terkait peluang untuk berinvestasi, pelatihan-pelatihan serta pelayanan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Dengan keterbukaan informasi tersebut, diharapkan para pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai program pemerintah secara optimal untuk meningkatkan daya saing para pelaku UMKM. Namun, efektivitas dari penggunaan media sosial oleh pemerintah tidak hanya melihat dari jumlah atau unggahan maupun pengikut, akan tetapi dilihat dari bagaimana informasi yang disampaikan mampu membangun kepercayaan publik. Kepercayaan publik menjadi elemen yang penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Hal ini menjadi cerminan sejauh mana masyarakat yakin dan percaya terhadap integritas, kompetensi dan niat baik pemerintah dalam melayani mereka, terutama dalam mendukung sektor UMKM.



**Gambar 1. 2 Instagram Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Sumber: Instagram

**Gambar 1.2.** merupakan representasi jumlah pengikutnya akun *Instagram* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bernama @dpmptsp.jabar dan memiliki jumlah pengikut sebanyak 14 ribu dan sudah mendapatkan *verified* dari pihak Instagram. Didalam akunnya berisi postingan yang berjumlah 4.824. Jumlah pengikut yang signifikan menunjukkan bahwa banyak

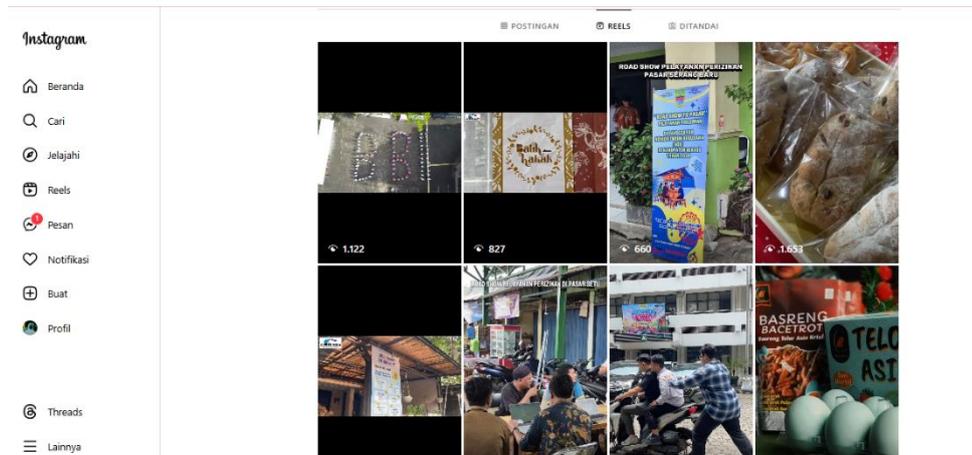
masyarakat yang tertarik dan aktif menerima informasi terkait pelayanan dan kegiatan program yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP Jawa Barat.



**Gambar 1. 3 Insights Instagram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat**

Sumber: Instagram @dpmptsp.jabar

Berdasarkan Gambar 1.3. data insights Instagram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam berbagai interaksi dan jangkauan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi digital mengalami kemajuan dalam menyampaikan informasi dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam bagian jangkauan, jumlah akun yang menjangkau konten meningkat menjadi 12,2 rb yang berarti semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan layanan dan informasi yang disajikan. Keterlibatan masyarakat pada bagian interaksi konten mengalami kenaikan karena setiap tanggapan dan masukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Jumlah pengikut akun Dinas PMPTSP Jawa Barat ini bertambah dalam beberapa tahun terakhir sebanyak 654. Hal ini menjadi indikator positif bahwa semakin bertambah masyarakat yang tertarik mengikuti perkembangan kebijakan dan layanan publik yang disampaikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disajikan. Kemajuan ini tidak akan dapat dicapai tanpa dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.



**Gambar 1. 4 Postingan Instagram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu**

Sumber: Instagram @dpmptsp.jabar

**Gambar 1.4.** merupakan representasi dari aktivitas postingan yang dipublikasikan mengenai panduan perizinan, program investasi, prestasi, hingga program kerja yang disajikan secara modern dengan visual yang kreatif menggunakan infografis, video, dan animasi untuk menyampaikan pesan secara efektif, sehingga masyarakat serta pelaku usaha dapat memahami informasi dengan lebih mudah dan cepat. Pada beberapa postingan juga sering kali mengundang masyarakat untuk berkomentar dan memberikan masukan terkait layanan yang diterima. Respon yang diberikan pada kolom komentar atau fitur pesan menjadi bukti komitmen bahwa Dinas PMPTSP mampu menciptakan komunikasi dua arah. Selain itu, Dinas PMPTSP Jawa Barat seringkali membagikan infografis yang memudahkan masyarakat untuk memahami proses perizinan. Dengan pendekatan visual yang menarik, DPMPTSP Jabar berusaha untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemerintah.

Meskipun Dinas PMPTSP Jawa Barat telah berupaya memanfaatkan Instagram sebagai platform bagi pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan menyebarluaskan informasi. Akan tetapi, masih terdapat keluhan dari masyarakat diantaranya yaitu komentar dari pengguna Instagram yang terlampir dibawah ini:



**Gambar 1. 5 Komentar Instagram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu**

Instagram @dpmptsp.jabar

Gambar 1.5. merupakan beberapa komentar yang pesannya tidak dibalas oleh akun Instagram Dinas PMPTSP Jawa Barat, dimana hal ini menunjukkan kurangnya responsivitas dari pengelolaan interaksi digital. Hal tersebut jika sering terjadi akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat yang memiliki harapan agar pertanyaan maupun keluhan tersebut dijawab dengan cepat, terutama dalam konteks pelayanan publik seperti perizinan usaha ataupun investasi. Apabila komentar-komentar tersebut tidak ditanggapi, masyarakat menjadi merasa terabaikan, yang nantinya akan memperngaruhi persepsi terkait transparansi dan akuntabilitas dari Dinas PMPTSP Jawa Barat. Adapun hal tersebut dapat menyebabkan kepercayaan publik yang lemah akibat kegagalan dalam berkomitmen terhadap pelayanan publik yang responsif, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kepercayaan publik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana strategi *Open Government* yang diterapkan melalui Instagram @dpmptsp.jabar mempengaruhi kepercayaan publik. Selama ini, belum ada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai pengaruh *Open Government* dan kualitas informasi pada akun tersebut terhadap tingkat kepercayaan publik baik secara umum dan secara khusus kepada pelaku UMKM. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana interaksi di media sosial Instagram, dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap Dinas PMPTSP Jawa Barat. Dengan memahami faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kepercayaan publik melalui uraian, dukungan data, serta teori yang ada penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *OPEN GOVERNMENT* DAN KUALITAS INFORMASI AKUN INSTAGRAM TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Meskipun Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat memanfaatkan Instagram sebagai platform untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat, masih ditemukan sejumlah keluhan terkait kurangnya respons terhadap komentar maupun pesan yang disampaikan oleh masyarakat.
2. Meskipun Instagram Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat telah berupaya menerapkan prinsip *Open Government* melalui transparansi, partisipasi dan kolaborasi yang dapat membangun kepercayaan publik akan tetapi belum terukur dengan jelas.
3. Kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang disampaikan melalui Instagram oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Informasi yang disampaikan harus akurat, relevan, dan tepat waktu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar

penggunaan *Open Government* dan kualitas informasi yang disampaikan melalui Instagram oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan, penulis selanjutnya merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Open Government* melalui akun Instagram Dinas PMPTSP Jawa Barat terhadap kepercayaan publik, khususnya pelaku UMKM?
2. Seberapa besar pengaruh kualitas informasi melalui akun Instagram Dinas PMPTSP Jawa Barat terhadap kepercayaan publik dari kalangan UMKM?
3. Seberapa besar sumbangan dari dimensi-dimensi variabel *Open Government* dan kualitas informasi pada akun Instagram Dinas PMPTSP Jawa Barat secara simultan terhadap kepercayaan publik pelaku UMKM?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur pengaruh strategi *Open Government* melalui akun Instagram Dinas PMPTSP Jawa Barat terhadap kepercayaan publik, khususnya pelaku UMKM.
2. Untuk mengukur pengaruh kualitas informasi melalui akun Instagram Dinas PMPTSP Jawa Barat terhadap kepercayaan publik dari kalangan pelaku UMKM.
3. Untuk menganalisis pengaruh sumbangan dari dimensi-dimensi *Open Government* dan kualitas informasi pada akun Instagram Dinas PMPTSP Jawa Barat secara simultan terhadap tingkat kepercayaan pelaku UMKM.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap bahwa temuan dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman terkait hubungan antara kualitas informasi yang disajikan

melalui media sosial dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai komunikasi publik di era digital, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori terkait kepercayaan publik dan pengembangan media sosial dapat menjadi alat penting dalam membangun hubungan yang transparan dan terpercaya antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa dengan fokus kajian *e-government*.

## **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap bahwa temuan dari penelitian ini dapat menjadi saran maupun masukan yang kemudian dapat digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat mengenai pentingnya kualitas informasi yang dipublikasikan melalui platform digital, seperti Instagram. Dengan memahami elemen informasi yang berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam merancang kebijakan atau pedoman tentang bagaimana mengelola akun media sosial pemerintah dengan lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

## **F. Kerangka Berfikir**

Konsep ini berangkat dari teori bahwa pemerintah terbuka dan penyampaian informasi yang berkualitas memiliki pengaruh yang signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Lee et al. (2012) mendefinisikan *Open Government* adalah suatu pendekatan yang berfokus pada peningkatan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi, khususnya media sosial. Dalam konsep ini, pemerintah menyediakan akses terbuka terhadap data dan informasi publik, mendorong keterlibatan warga dalam proses pembuatan keputusan, serta menciptakan peluang kolaborasi dengan

pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak lain untuk bersama-sama mengatasi masalah publik.

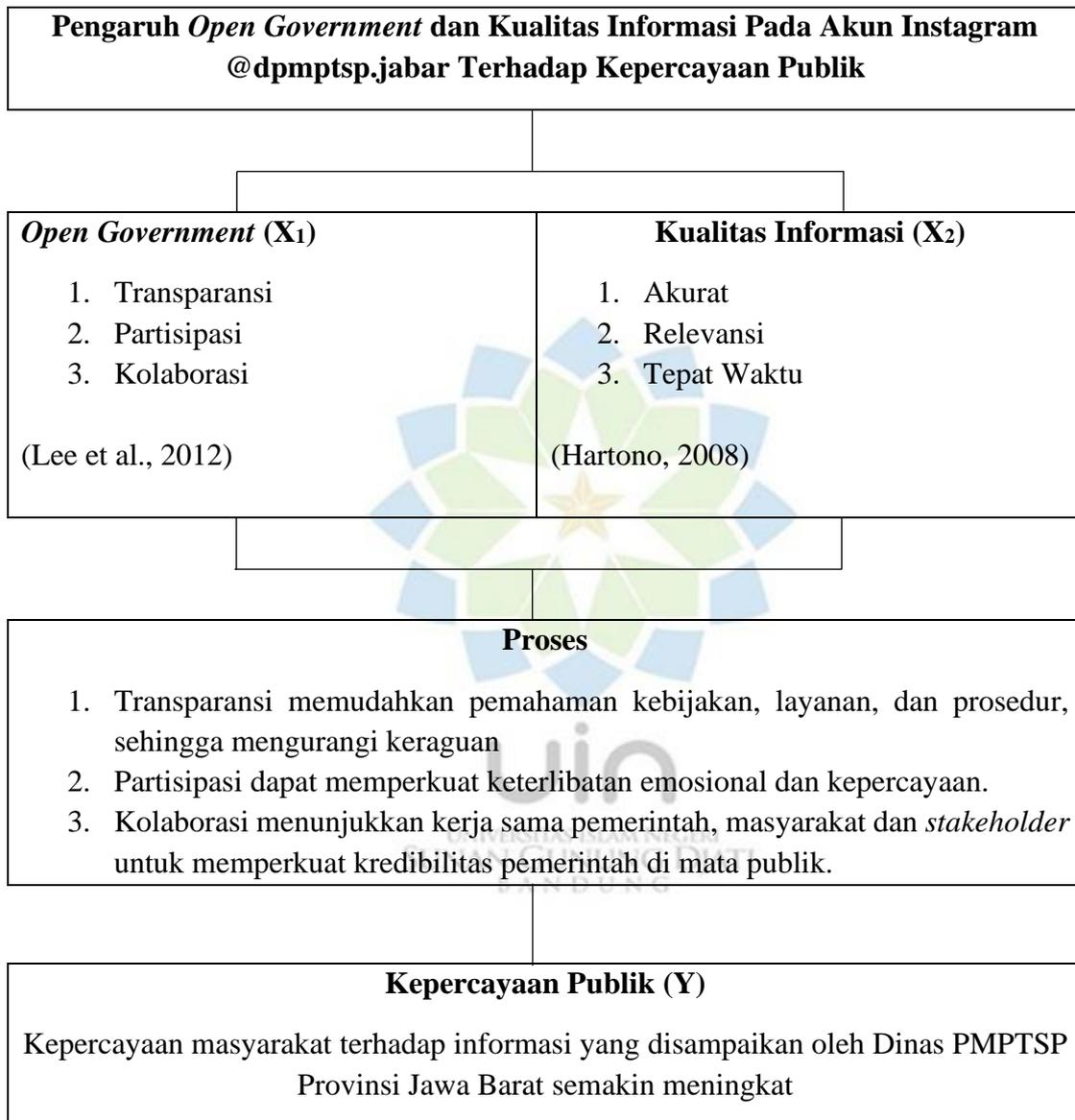
Sementara itu, variabel kualitas informasi menurut Hartono (2008) merujuk pada tiga aspek utama yaitu akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu. Informasi yang akurat akan mengurangi adanya kesalahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Relevansi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, informasi yang disampaikan secara tepat waktu menciptakan persepsi yang baik dari masyarakat mengenai pelayanan yang cepat dan tanggap.

Hubungan *Open Government* dan kualitas informasi dengan kepercayaan publik sangat penting dalam konteks pemerintah modern, keterbukaan pemerintah memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cara yang lebih optimal yang dapat membangun kepercayaan dan legitimasi pemerintah (Bannister et al., 2011). Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *Open Government* di media sosial, seperti Instagram, dapat memberikan platform bagi pemerintah untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dengan pemerintah.

Kepercayaan publik menjadi indikator kesuksesan dari keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, serta keberhasilan adopsi teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Zuiderwijk et al., (2014) berpendapat bahwa kepercayaan publik adalah keyakinan masyarakat bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan harapan dan kepentingan mereka, serta melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan optimal. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan tujuan bernegara (Fung, 2015).

Kepercayaan publik merupakan hasil yang diharapkan dari administrasi publik yang baik, governansi digital yang efektif, penggunaan media sosial oleh pemerintah, dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka. Ketika pemerintah mampu menjalankan fungsi administratif secara transparan, interaktif,

dan responsif, hal ini akan meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah.



**Gambar 1. 6 Kerangka Pemikiran**

Sumber: diolah peneliti (2025)

## G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan sebuah pendapat awal terhadap masalah yang perlu dianalisis kebenarannya dengan menggunakan data yang terkumpul melalui penelitian. Berikut adalah hipotesis yang akan diuji oleh penulis:

H<sub>1</sub>:  $b > 0$  : Adanya pengaruh secara signifikan antara variabel *Open Government* pada media sosial Dinas PMPTSP Jawa Barat terhadap variabel Kepercayaan Publik

H<sub>0</sub>:  $b < 0$  : Tidak adanya pengaruh secara signifikan antara variabel *Open Government* pada media sosial Dinas PMPTSP Jawa Barat terhadap variabel Kepercayaan Publik

H<sub>2</sub>:  $b > 0$  : Adanya pengaruh secara signifikan antara variabel Kualitas Informasi pada media sosial Dinas PMPTSP Jawa Barat terhadap variabel Kepercayaan Publik

H<sub>0</sub>:  $b < 0$  : Tidak adanya pengaruh secara signifikan antara variabel Kualitas Informasi pada media sosial Dinas PMPTSP Jawa Barat terhadap variabel Kepercayaan Publik

H<sub>3</sub>:  $b > 0$  : Adanya pengaruh secara simultan antara variabel *Open Government* dan Kualitas Informasi pada media sosial Dinas PMPTSP Jawa Barat terhadap variabel Kepercayaan Publik

H<sub>0</sub>:  $b < 0$  : Tidak adanya pengaruh secara simultan antara variabel *Open Government* dan variabel Kualitas Informasi pada media sosial Dinas PMPTSP Jawa Barat terhadap variabel Kepercayaan Publik